

PANDANGAN UMUM

FRAKSI DEMOKRAT- DPRD KOTA SALATIGA

TERHADAP RAPERDA

**TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)**

TAHUN 2025 - 2029



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KOTA SALATIGA
2025**

PANDANGAN UMUM
FRAKSI DEMOKRAT - DPRD KOTA SALATIGA
TERHADAP RAPERDA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
TAHUN 2025 - 2029

Assalamu'alaikum wr.wb.

Shaloom... ,

Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.

Om swasti astu..

Namo budaya...

Salam kebajikan..

- Yang kami hormati Walikota dan Wakil Walikota Salatiga
- Yang kami hormati Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga
- Yang kami hormati Segenap anggota DPRD Kota Salatiga
- Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Salatiga
- Yang kami hormati Segenap Forkopimda Kota Salatiga
- Yang kami hormati Segenap Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
- Yang kami hormati Camat dan Lurah se Kota Salatiga
- Bapak, Ibu Tamu undangan yang berbahagia.

Mengawali Pandangan Umum Fraksi Demokrat, marilah kita bersama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Salatiga, dalam rangka :

- 1. Pembicaraan Tingkat I atas Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.**
- 2. Serta Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.**

dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun.

Bapak, Ibu Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati...

Setelah kami membaca dan mencermati Rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang telah disampaikan oleh Walikota Salatiga, maka sehubungan dengan penyampaian RAPERDA Tentang RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 kami Fraksi Demokrat menyampaikan beberapa hal terkait dengan pandangan umum yaitu sebagai berikut :

- 1. Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Salatiga dan Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Salatiga serta Lembaga DPRD Kota Salatiga yang telah melaksanakan pembahasan bersama terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, dengan adanya rancangan akhir RPJMD, sehingga bisa selesai tepat waktu dan menghasilkan kesepakatan kesepakatan yang berupa program pembangunan daerah dan target yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang di Kota Salatiga.**
- 2. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029**

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota untuk waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi Pembangunan Daerah,

kebijakan umum, program Pembangunan Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Oleh karena itu penyusunan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

RAPERDA Tentang RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 adalah merupakan Rencana Pembangunan Daerah yang harus berdasarkan pada masukan masukan dari pemangku kepentingan dan menyerap aspirasi Masyarakat secara maksimal, serta perwujudan Pembangunan juga mengacu pada kebutuhan Masyarakat dan terwujudnya pembangunan untuk kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, kami dari Fraksi Demokrat memberikan masukan kepada pemerintah Kota Salatiga dimana RPJMD Tahun 2025-2029 harus sesuai dengan perencanaan yang tidak pernah terpisahkan dengan rencana pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan.

Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029, berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan; Apakah dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta kejelasan rumusan dan adanya keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Terkait akan itu perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1) Di Bidang Kesehatan

Dalam pelayanan kesehatan kami berharap, Pemerintah Kota Salatiga untuk lebih sungguh-sungguh memperhatikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Baik RSUD dan Puskesmas perlu adanya suatu ketentuan peraturan sebagai acuan dalam pengelolaan dan pelayanan. Sekalipun tidak berorientasi bisnis semata akan tetapi harus bisa memberikan pelayanan dasar tentang kesehatan kepada masyarakat secara optimal. Saat ini masih terjadi perlakuan yang berbeda antara masyarakat yang menggunakan fasilitas BPJS yang ditanggung oleh Pemerintah dengan masyarakat yang menggunakan BPJS mandiri, untuk itu kami berharap agar kejadian semacam ini bisa ditinggalkan dan tidak akan terulang di tahun tahun yang akan datang. Pemerintah juga perlu mencari solusi tentang kesulitan kesulitan bagi pemegang kartu BPJS yang masih sering terjadi, ketika ingin menggunakan Fasilitas untuk berobat.

2) Di Bidang Pendidikan

Proyeksi penduduk anak usia sekolah bertujuan untuk menganalisis kebutuhan fasilitas pendidikan di masa yang akan datang. Hal ini bertujuan agar fasilitas yang ada dapat mencukupi kebutuhan Masyarakat secara merata. Karena sasaran pokok di Bidang Pendidikan adalah Terwujudnya SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat. Jadi untuk mewujudkan SDM yang unggul, masyarakat membutuhkan sarana pendidikan yang memadai dan merata di setiap wilayah.

Dalam aspek pendidikan di kota Salatiga masih di temukan ketimpangan- ketimpangan sarana prasaranan pendidikan yang kurang merata di setiap wilayah Kecamatan. Hal ini sangat berpengaruh bagi peserta didik baru dalam mencari sekolah karena masih berlakunya

sistim zonasi atau domisili, yang mengakibatkan masih banyak masyarakat usia sekolah bersekolah tidak sesuai dengan harapannya bahkan ada yang terpaksa putus sekolah karena tidak dapat sekolahan, ini menurut kami perlu adanya kebijakan khusus oleh pemerintah daerah dalam pembangunan sarana pendidikan ke depan.

Dalam rangka mendukung kota Salatiga sebagai kota Pendidikan, pemerintah kota Salatiga perlu meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Salatiga, dengan cara perlu mengadakan pendataan terhadap semua sekolah yang ada, dan mengidentifikasi apa yang menjadi kekurangan, baik sarana maupun prasaranan di semua sekolah di semua jenjang, baik PAUD, TK, SD, SMP maupun SMA sederajat.

Sehingga Pemerintah Kota Salatiga bisa lebih mudah ketika ingin membuat kebijakan di masing-masing sekolah tersebut dalam rangka menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi.

3) Di Bidang Ekonomi

Proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Penduduk adalah obyek dan subyek dari pembangunan pertumbuhan ekonomi, maka pembangunan harus berpusatkan pada penduduk, yaitu pembangunan yang berorientasi kepada potensi dan kebutuhan sosial, ekonomi dan budaya. Di bidang ekonomi masih sering kita temukan adanya ketimpangan pertumbuhan ekonomi masyarakat di masing masing wilayah kecamatan. Dengan adanya Jalan Lingkar Selatan, itu sangat berpengaruh adanya pertumbuhan perekonomian di sekitae wilayah tersebut, tapi di daerah Salatiga utara masih belum tersentuh. Ini perlu segera adanya tindak lanjut perencanaan pembangunan yang sudah ada untuk segera dilaksanakan, sehingga bisa menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan nilai output dari seluruh sektor produksi dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi di dalam masyarakat.

Daya Saing Ekonomi Daerah yang menjadi permasalahan utama Kota Salatiga adalah perkembangan ekonomi lokal yang belum optimal. Ekonomi lokal merupakan proses pembangunan ekonomi yang menitik beratkan pada kerjasama antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Sehingga hubungan yang terbentuk antara pihak-pihak tersebut akan sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan dari pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal di Kota Salatiga belum berjalan secara optimal hal ini terlihat dari masih rendahnya UKM yang mampu mengakses permodalan serta rendahnya kualitas produk oleh UKM, hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah belum melaksanakan pembinaan kepada UKM secara optimal.

Selain itu rendahnya kegiatan pemantauan dan pengawasan penanaman modal juga menjadi penghambat perkembangan ekonomi lokal. Menurut kami untuk menekan angka kemiskinan dan angka pengangguran terbuka yang ada, pemerintah Kota Salatiga perlu mendorong para pelaku UKM untuk bisa mengembangkan usahanya serta di dukung dengan kemudahan dalam hal memperoleh permodalan.

Perlu dilakukan pendataan yang akurat terhadap keberadaan UMKM yang ada, karena kami melihat masih ada beberapa UMKM yang terdaftar di kota salatiga, akan tetapi tidak ada aktivitas sama sekali.

Sehingga pemerintah kota Salatiga akan lebih bisa maksimal dan terarah dalam mendukung keberadaan maupun aktivitas usaha oleh semua pelaku UMKM, sehingga derajat perekonomian masyarakat meningkat, yang bisa menekan angka kemiskinan dan angka pengangguran terbuka. Pemerataan pembangunan ekonomi masyarakat merupakan salah satu indikator penting yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil pembangunan.

Selain itu pemerintah kota Salatiga harus terus berupaya meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

Kami berharap Pemerintah Kota Salatiga untuk lebih serius dalam menangani dan mengelola PDAM serta PDAU. Karena menurut kami, Pemerintah Kota Salatiga selama ini belum terlihat serius menangani kedua badan usaha ini, padahal kedua badan usaha tersebut selalu memberikan kontribusi untuk PAD kita.

Bapak, Ibu Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati...

Adapun permasalahan dasar yang sering timbul dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), karena masih ada kurangnya koordinasi antar lembaga Tata Kelola pemerintah yang sering terjadi di tiap daerah. Hal ini merujuk pada kurangnya komunikasi, kerjasama, dan kolaborasi yang efektif antara berbagai lembaga atau departemen yang bertanggung jawab atas berbagai aspek kebijakan atau tugas dalam sebuah entitas. Dampak dari kurangnya koordinasi antar lembaga dapat berdampak negatif pada efisiensi, efektivitas, dan pengambilan keputusan. Kurangnya koordinasi antar Lembaga di Kota Salatiga disebabkan karna belum optimalnya fungsi beberapa perangkat daerah sebagai koordinator/fasilitator antar perangkat, belum tersedianya sistem logistik (penyediaan dan distribusi) pangan serta koordinasi dan sinkronisasi pengelolaannya, rendahnya koordinasi Dengan Terkait dengan belanja Daerah apabila disandingkan dengan pendapatan masih terjadi defisit yang cukup tinggi sekalipun didalam belanja harus disesuaikan dengan pendapatan yang ada. Memang dalam hal ini harus ada rasionalisasi terkait dengan anggaran yang diajukan oleh masing-masing OPD terkecuali apabila dalam penggunaannya untuk pemenuhan Belanja Pegawai dan kebutuhan rutin.

Selama ini yang terjadi hampir di semua OPD yang ada, laju serapan anggaran masih kurang maksimal. Kami melihat semua ini terjadi karena, perencanaan yang kurang baik pada kegiatan kegiatan yang diusulkan. Serapan anggaran harus terencana secara cermat karena tidak dikehendaki terkait dengan adanya kegiatan yang sia-sia dan harus dilakukan secara efisien, efektif, dan mengutamakan asas kemanfaatan.

Untuk itu kami berharap kepada pemerintah kota Salatiga untuk bisa benar-benar memaksimalkan perencanaan pada semua kegiatan yang dianggarkan. Sehingga ketika pada pelaksanaan semua kegiatan yang telah dianggarkan bisa berjalan dengan baik dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Rapat Paripurna yang kami hormati, demikian Pandangan Umum dari Fraksi Demokrat yang kami sampaikan, besar harapan kami apa yang telah kami sampaikan untuk bisa menjadi perhatian semua pihak, demi kemajuan dan kesejahteraan Kota Salatiga dan kami berharap Raperda tersebut segera bisa disetujui bersama dan segera ditetapkan menjadi Perda.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Salatiga, 10 Juni 2025

FRAKSI DEMOKRAT DPRD

Kota Salatiga

1. Ketua : Antonius Doohan Kuswirasetiawan ()

2. Wakil Ketua : Andreas Yosep Kristiyanto ()

1. Sekretaris : Ari Widiyatmoko ()